

Kontekstualisasi Fiqh Budgeting di Indonesia: Systematic Literature Review

Soleh Hasan Wahid, M. Muhsin

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Indonesia

Abstrak:

Korupsi dalam bentuk mark-up anggaran menjadi salah satu kasus yang cukup sering terjadi di Indonesia. Model penganggaran yang kurang transparan menjadi salah satu faktornya. Dalam kaitan ini, beberapa peneliti mengusulkan konsep integrasi penganggaran dengan menyuntikkan teori fiqh budgeting namun tataran aplikatif masih sangat minim. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat riset-riset mengenai fiqh budgeting, dalam jurnal-jurnal ilmiah di Indonesia, menilai relevansi dan keterbatasannya. Metodologi yang diadopsi dalam artikel ini adalah tinjauan pustaka sistematis. Pencarian artikel dilakukan secara sistematis melalui Google Scholar dan Bielefeld Academic Search Engine (BASE) dengan memilih literatur dari publikasi ilmiah di jurnal dan mengecualikan literatur yang berasal dari selain jurnal. Periode artikel yang dipilih adalah artikel jurnal terbitan 2010-2020. Penelitian penganggaran fikih di Indonesia masih minim pada tataran praktis. Selain itu, riset mengenai fiqh budgeting telah menghubungkan dengan konsep fiskal negara, namun temuan riset masih berupa konsep dan belum menyentuh aspek yang lebih aplikatif (terapan). Temuan penelitian saat ini menekankan pada dua aspek: pertama, perlu dilakukan kontekstualisasi penganggaran fikih berbasis Maqashid Syariah dan kontekstualisasi dan penganggaran Fiqh berbasis integrasi pajak dan zakat. (Corruption in budget mark-ups is a reasonably frequent case in Indonesia. The less transparent budget model is one of the factors. In this regard, several researchers have proposed the concept of budgeting integration by injecting fiqh budgeting theory, but the applicative level is still very minimal. Therefore, this study aims to examine research on fiqh budgeting in scientific journals in Indonesia to assess their relevance and limitations. The methodology adopted in this article is a systematic literature review. Article



searches were carried out systematically through Google Scholar and Bielefeld Academic Search Engine (BASE) by selecting literature from scientific publications in journals and excluding literature from other than journals. The selected article period is journal articles published from 2010-2020. Jurisprudence budgeting research in Indonesia is still minimal at a practical level. In addition, research on fiqh budgeting has connected with the concept of state fiscal, but the research findings are still in the form of concepts and have not touched on more applicable (applied) aspects. The current study's findings emphasize two aspects: first, it is necessary to contextualize fiqh budgeting based on Maqashid Syariah and contextualization and Fiqh budgeting based on the integration of taxes and zakat.)

Kata Kunci:

Budgeting, Fiqh, Hukum Ekonomi Islam

Pendahuluan

Fiqh budgeting atau fiqh anggaran sebagai salah satu konsep yang di usung bersamaan dengan konsep ekonomi Islam sendiri. Secara kontekstual belum se-aplikatif konsep lainnya. Contohnya, konsep profit sharing, konsep sukuk, waqf, zakat dan sejenisnya. Tentu ada banyak faktor di dalamnya, diantaranya konsep yang di usung oleh ulama di abad pertengahan cenderung tidak utuh, lantaran kajian mengenai fiqh anggaran menjadi sub-bab dari fiqh ketatanegaraan. Dalam pembahasan para pemikir muslim tersebut, ada satu titik temu dalam keseluruhan konsep yang ditawarkan yakni penjelasan bahwa semua bentuk pengelolaan keuangan negara dipusatkan pada lembaga pemerintahan sejenis Kementerian Keuangan yang dikenal dengan Bait al-Maal ¹.

Sedangkan dari sisi bentuk kebijakan fiskal pemikiran yang muncul adalah berkaitan dengan kebijakan Jizyah dan Kharaj yang diprakarsai oleh Umar bin Khattab.² Masalahnya, kedua konsep di atas tidak selaras apabila disandarkan dengan istilah anggaran atau

¹ Nabih Amin Faris., *History of the Arabs, The Muslim World*, vol. 27, 1937, <https://doi.org/10.1111/j.1478-1913.1937.tb00371.x>.

² Abi al Hasan Ali Ibn Muhammad Ibn Habib al Basari al Baghdadi al Mawardi, *Kitab Al Ahkam Al Sulthoniyah Wa Al Wilayat Al Diniyah* (Beirut: Dar al Fikr, s.a, n.d.).

APBN atau yang disebut oleh Nurul Iman sebagai APBN Syariah. Menurutnya, APBN Syariah merupakan konsep yang lebih berkaitan dengan sistem penganggaran, manajerial anggaran, sehingga kurang tepat apabila disandingkan dengan istilah Baitul Maal³.

Sampai di sini dapat dikatakan bahwa konsep fiqh anggaran dalam kaitannya dengan sistem anggaran di Indonesia belum matang, baik secara teoritis apalagi implementasinya. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mematangkan konsep fiqh anggaran itu sendiri dengan tujuan agar konsep ini dapat diimplementasikan baik secara substansi maupun secara praktis. Atau meminjam dari istilah yang dikemukakan oleh Dahlan et.al yakni teori eksistensi (hukum Islam eksis dalam sistem hukum nasional)⁴. Dengan demikian, tujuan dari kajian ini adalah agar konsep fiqh anggaran dapat eksis atau bahkan secara implementatif diterapkan di Indonesia.

Dengan menggunakan pendekatan Systematic Literature Review, kajian ini berupaya mengulas kembali topik mengenai fiqh anggaran dalam berbagai literature yang ada. Sehubungan dengan kajian mengenai ekonomi syariah atau hukum ekonomi syariah dengan pendekatan Systematic Literature Review, peneliti menemukan beberapa kajian lain dengan objek berbeda. Pertama, Latifah & Ritonga⁵ mengaji mengenai Kompetensi Sumber Daya Insani Bagi Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia dengan pendekatan Systematic Literature Review. Berikutnya, Nomran & Haron⁶ menggunakan pendekatan ini hubungan tata Shari'ah governance (SG), yang diwakili oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS), dengan kinerja perusahaan bank syariah (IB). Artinya, penelitian mengenai konsep dan integrasi fiqh Anggaran dalam sistem APBN di

³ Mustofa Nurul Iman, "Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Berbasis Hukum Ekonomi Syari'ah: Kritik Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Di Indonesia." (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2015), <http://digilib.uinsgd.ac.id/17311/>.

⁴ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam Indonesia, Jilid. 1. Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1997).

⁵ "Systematic Literature Review (SLR): Kompetensi Sumber Daya Insani Bagi Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia," *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* (Universitas Muhammadiyah Tangerang, 2020), <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2763>.

⁶ "A Systematic Literature Review on Shari'ah Governance Mechanism and Firm Performance in Islamic Banking," *Islamic Economic Studies* 27, no. 2 (January 1, 2020): 91-123, <https://doi.org/10.1108/ies-06-2019-0013>.

Indonesia dengan pendekatan Systematic Literature Review masih menjadi yang pertama dilakukan.

Penelitian ini mempertanyakan beberapa hal pokok yakni menilai keunggulan dan keterbatasan artikel-artikel yang fokus kajiannya mengenai fiqh budgeting? Menemukan model kontekstualisasi yang tepat antara fiqh budgeting dengan mekanisme penganggaran negara?

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan peneliti pada riset ini adalah Systematic Literature Review (SLR) yakni serangkaian proses mengidentifikasi, memilih, dan menilai penelitian secara kritis untuk menjawab pertanyaan yang dirumuskan dengan jelas.⁷ Berdasarkan pada tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengkonstruksi temuan-temuan dari jurnal yang mengaji mengenai fiqh anggaran. Metodologi yang diadopsi dalam artikel ini adalah systematic literature review sebagai dikembangkan oleh Liberati et al.,⁸

Objek penelitian dalam riset ini berupa artikel yang terindeks pada Google Scholar dan Bielefeld Academic Search Engine (BASE) dengan memilih literature dari publikasi ilmiah berupa jurnal dan mengecualikan literature yang berasal dari selain jurnal. Periode artikel yang dipilih adalah artikel jurnal yang terbit mulai tahun 2010-2020. Kata kunci yang digunakan dalam pencarian adalah "STRING: fiqh OR fikih OR OR fiqh Islamic Economic Law AND budget* OR anggaran". Untuk melakukan pencarian, istilah kunci terkait digunakan seperti yang ditunjukkan di atas. Penulis menggabungkan masing-masing dari dua kata kunci yang mewakili variabel (fiqh) dan variabel (anggaran) di bidang pencarian menggunakan pencarian Boolean AND, dan kemudian mereka memilih makalah dengan kata kunci tersebut setidaknya di salah satu bidang berikut, yaitu, judul, abstrak, dan kata kunci.

⁷ Dario Sambunjak, Miranda Cumpston, and Chris Watts, "Module 1: Introduction to Conducting Systematic Reviews. In: Cochrane Interactive Learning: Conducting an Intervention Review," Cochrane, 2017, <https://training.cochrane.org/interactivelarning/module-1-introduction-conducting-systematic-reviews>.

⁸ "The PRISMA Statement for Reporting Systematic Reviews and Meta-Analyses of Studies That Evaluate Healthcare Interventions: Explanation and Elaboration," *BMJ (Clinical Research Ed.)* 339, no. jul21 1 (December 4, 2009): b2700-b2700, <https://doi.org/10.1136/bmj.b2700>.

Proses pengumpulan dan analisis data terdiri dari lima langkah seperti yang diterapkan oleh Liberati et al.⁹. Merujuk pada Liberati et al.¹⁰ *Pertama*, 48 paper tentang fiqh anggaran dipilih setelah menyaring hasil melalui pencarian Boolean dan berdasarkan relevansinya dengan tujuan menggunakan kata kunci terkait. *Kedua*, duplikat dihilangkan sehingga tersisa 31 dokumen. Kemudian artikel diseleksi dengan meninjau kata kunci masing-masing dalam judul dan abstrak, dan ini menghasilkan total 15 dokumen. Adapun kriteria inklusi dan eksklusi yang diterapkan adalah mengaji fiqh anggaran dari segi konseptual maupun empiris, diterbitkan di jurnal, penelitian integrasi (Kriteria Inklusi) dan Tidak mengaji fiqh anggaran dari segi konseptual maupun empiris, diterbitkan di selain jurnal, penelitian integrasi. *Ketiga*, isi paper ditinjau secara keseluruhan, dan hanya makalah yang sesuai dengan kriteria yang dimasukkan. Berdasarkan langkah penyaringan 11 artikel dipilih untuk disintesis.



Gambar 1 Hasil Screening Artikel Fiqh Budgeting di Indonesia

⁹ (2009)

¹⁰ (2009)

Penyusunan research question pada systematic literature review ini menggunakan instrumen PICOC yakni populasi (Population), Intervensi (Intervention), Perbandingan (Comparison), Hasil (Outcomes), dan Konteks (Context) ¹¹. Secara detail, penerapan PICOC dalam literature review ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Penerapan PICOC pada Fiqh Budgeting

No	Unsur Picoc	Detail
1	Population	Government Budget, State budget, budget system
2	Intervention	Fiqh Anggaran, Fikih Budgeting, Fikih Anggaran, Fikih Budgeting, Anggaran Perspektif Ekonomi Islam, budget system in Islamic Economic.
3	Comparison	-
4	Outcomes	Integrasi fiqh budgeting pada sistem anggaran, Implementasi fiqh budgeting pada sistem anggaran
5	Context	Studi Kasus, Studi Toeritis

Selanjutnya, berdasarkan PICOC tersebut disusun research question sebagai berikut:

Tabel 2 Research Question Fiqh Budgeting

No	Kode	Pertanyaan Penelitian
1	RQ-1	Jurnal apa saja yang memuat penelitian tentang Fiqh Budgeting?
2	RQ-2	Metode apa saja yang digunakan dalam penelitian-penelitian yang ada?
3	RQ-3	Apa kelemahan dari metode yang diterapkan dalam menganalisis integrasi dan atau implementasi fiqh budgeting dalam sistem anggaran dari jurnal?
4	RQ-4	Apa temuan dari jurnal-jurnal yang membahas mengenai intergrasi fiqh budgeting dalam konsep sistem anggaran?
5	RQ-5	Bagaimana temuan dari jurnal-jurnal yang membahas mengenai implementasi fiqh budgeting dalam konsep sistem anggaran?
6	RQ-6	Bagaimana konstruksi dari temuan-temuan jurnal yang ada?

¹¹ Barbara A. Kitchenham, Emilia Mendes, and Guilherme H. Travassos, "Cross versus Within-Company Cost Estimation Studies: A Systematic Review," *IEEE Transactions on Software Engineering* 33, no. 5 (May 2007): 316-29, <https://doi.org/10.1109/TSE.2007.1001>.

Berdasarkan pada RQ-1 sampai dengan RQ-6 di tabel 2, selanjutnya di susun peta pikiran sebagai berikut:



Gambar 2 Bagan Pertanyaan Penelitian

Publikasi Jurnal yang Signifikan

Dengan pendekatan *systematic literature review* ditemukan 11 jurnal yang membahas persoalan “fiqh budgeting”. Studi mengenai Fiqh Budgeting ditemukan pada 2012 hingga 2018 masing-masing sebanyak 1 kali, sedangkan pada tahun 2019 ditemukan dua studi mengenai fiqh budgeting. Secara detail berikut merupakan publikasi jurnal yang signifikan dengan kriteria inklusi yang telah ditetapkan:

Tabel 3 Publikasi Jurnal yang Signifikan

No	Nama Penerbit	Tahun
1	Jurnal AL-QALAM	2012
2	Al Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam	2015
3	Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum	2017
4	University Library of Munich, Germany	2017
5	Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)	2018
6	Al-Amwal : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah	2018
7	Al-'Adalah	2019
8	Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law	2019
9	Reslaj : Religion Education Social	2019

No	Nama Penerbit	Tahun
10	Laa Roiba Journal INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan	2019
11	Lambung Mangkurat Law Journal	2019

Berdasarkan pada tabel tersebut, ditemukan bahwa penelitian terbanyak yang membahas tentang “Fiqh Budgeting” dilakukan pada 2019, artinya topik ini mulai menjadi perhatian dan lebih menarik minat para peneliti mulai tahun 2019. Menariknya, di antara 11 jurnal tersebut, terdapat peneliti yang beberapa kali menulis topik ini. Oleh karena itu, sebagai pelengkap, peneliti juga melakukan analisis terhadap peneliti paling produktif dalam topik yakni Aan Jaelani¹² dengan jumlah 3 paper.

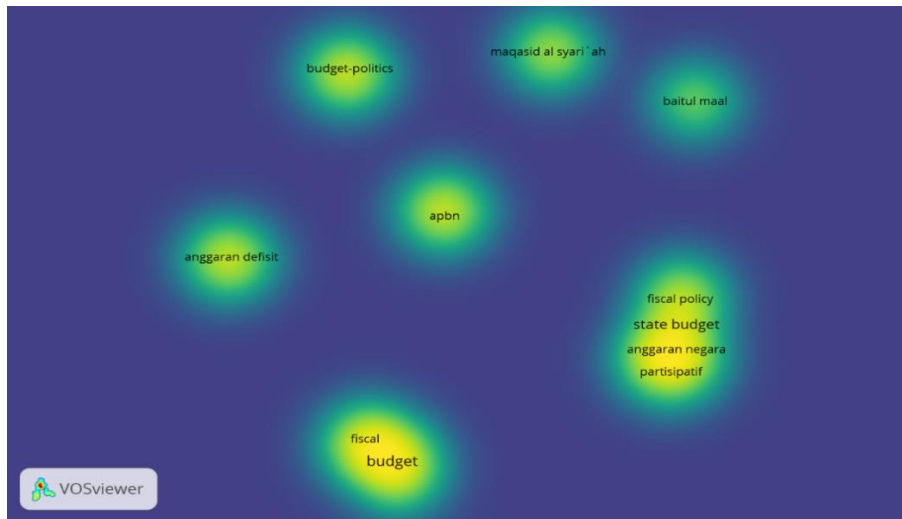
Selected	Author	Documents ▾	Total link strength
<input checked="" type="checkbox"/>	jaelani, aan	3	0
<input checked="" type="checkbox"/>	ghozali, mohammad	1	1
<input checked="" type="checkbox"/>	junaedi, dedi	1	1
<input checked="" type="checkbox"/>	khoirunnisa, ria	1	1
<input checked="" type="checkbox"/>	murtazam, teguh	1	1
<input checked="" type="checkbox"/>	salistia, faisal	1	1
<input checked="" type="checkbox"/>	suganda, delfi	1	1
<input checked="" type="checkbox"/>	ahmad, m	1	0
<input checked="" type="checkbox"/>	arif, firman muhammad	1	0
<input checked="" type="checkbox"/>	arno, abd kadir	1	0
<input checked="" type="checkbox"/>	arwani, agus	1	0
<input checked="" type="checkbox"/>	muhajirin	1	0

Gambar 3 Penulis Terproduktif

¹² “Pengelolaan APBN Dan Politik Anggaran Di Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Islam,” *ALQALAM* 29, no. 1 (April 30, 2012): 1, <https://doi.org/10.32678/alqalam.v29i1.589>; Aan Jaelani, “Sistem Anggaran Berbasis Kinerja Pada APBN Di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam,” *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari’ah* 10, no. 1 (June 16, 2018): 128, <https://doi.org/10.24235/amwal.v10i1.2871>; “Public Expenditure Management in Indonesia: Islamic Economic Review on State Budget 2017,” *Discussion Papers* (MDPI AG, 2017), <https://doi.org/10.20944/preprints201706.0122.v1>.

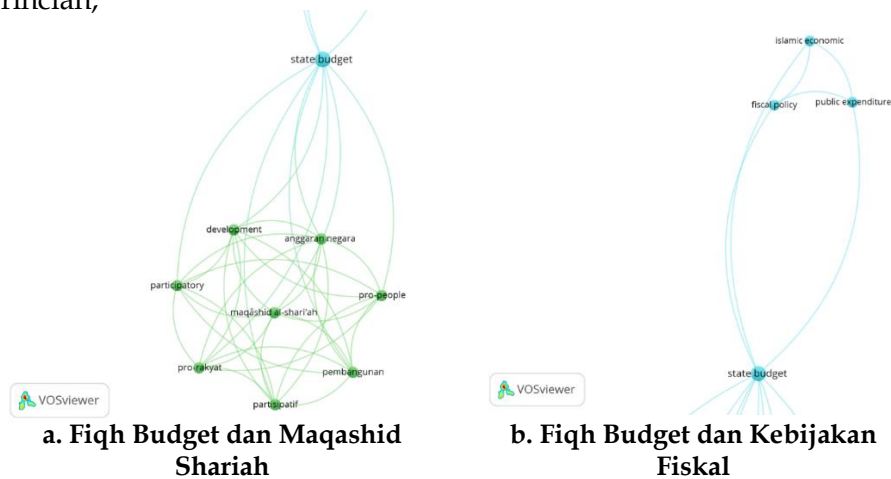
Topik Penelitian

Selanjutnya, berdasarkan keyword-nya ditemukan 7 kluster berbeda pada masing-masing fokus kajian sebagaimana terlihat pada



Gambar 4 Kluster Kajian Fiqh Budgeting di Indonesia

Sebagaimana tampak pada gambar di atas, topik-topik spesifik yang pernah dikaji dapat diklasifikasikan menjadi 7 kluster dengan rincian;



a. Fiqh Budget dan Maqashid Shariah
b. Fiqh Budget dan Kebijakan Fiskal
Gambar 5 Pola Hubungan Kajian State Budget dengan Maqashid Shariah dan Kebijakan Fiskal

Pertama, kata kunci berupa state budget, anggaran negara, fiscal policy, partisipatif saling terhubung dengan satu kata kunci yang “maqashid syariah”. Ketika dihubungkan dengan term “maqashid sharia”, topik ini berkembang dan saling terhubung dengan topik pro-rakyat, partisipatif, dan pembangunan. Artinya ketika secara keseluruhan dihubungkan ditemukan konsep pokok dalam kajian “fiqh budgeting” yakni pembangunan yang partisipatif yang pro-rakyat dalam konsep fiqh budgeting dapat menggunakan perspektif “maqashid sharia”. Diantaranya adalah studi yang dilakukan oleh Ahmad ¹³, penelitian ini bertumpu pada sumber pustaka yang memuat pengelolaan APBN dalam narasi fiqh anggaran dan maqâshid al-syari'ah sebagai landasan utama studinya.

Selanjutnya, Arif ¹⁴ yang berfokus pada anggaran belanja daerah berbasis maqashid al syari'ah: analisis realisasi APBD kota palopo dengan fokus permasalahan yaitu, realitas pemberdayaan anggaran belanja pemerintah dan realisasi pemanfaatannya di Kota Palopo, bagaimana pemerintah dan kebijakannya mendorong peningkatan taraf hidup masyarakat dengan realisasi anggaran belanja pemerintah secara hierarki atau interkoneksi konsep maqashid al-syari'ah.

Selanjutnya, ketika dihubungkan dengan kebijakan fiskal keyword yang muncul adalah public expenditure dan Islamic economic. Ini berarti bahwa konsep state budget dengan pendekatan ekonomi Islam kebanyakan ditinjau berdasarkan konsep kebijakan fiskal yang dikaitkan dengan public expenditure. Sepertinya yang dilakukan oleh Ahmad ¹⁵ di atas dan paper yang berfokus pada komparasi sistem kebijakan fiskal modern, klasik dan Islam ¹⁶. Konstruksi sistem kebijakan fiskal modern (pajak) dengan fiskal Islam (zakat) seperti yang dilakukan oleh ¹⁷.

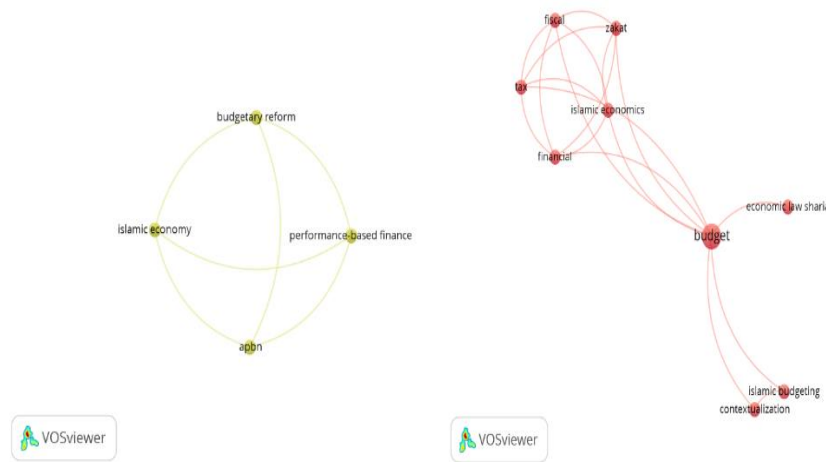
¹³ “Fiqh of Budgeting: Study of Management of the State Budget for People’s Welfare in the Perspective of Maqâshid Al-Shari’ah,” *Al-Adalah* 6, no. 1 (2019), <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/adalah.v16i1.4159>.

¹⁴ “Anggaran Belanja Daerah Berbasis Maqasid Al Syari’ah: Analisis Realisasi Anggaran Kota Palopo,” *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 13, no. 1 (July 20, 2019): 51-74, <https://doi.org/10.18326/infsl3.v13i1.51-74>.

¹⁵ “Fiqh of Budgeting: Study of Management of the State Budget for People’s Welfare in the Perspective of Maqâshid Al-Shari’ah,” 2019.

¹⁶ Lilik Rahmawati, “Sistem Kebijakan Fiskal Modern Dan Islam,” *OECONOMICUS Journal of Economics* 1, no. 1 (2016).

¹⁷ Ihdh Aini, “Kebijakan Fiskal Dalam Ekonomi Islam,” *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 17, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.32694/010760>.



a. Fiqh Budget dengan Ekonomi Islam dan Anggaran Berbasis Kinerja

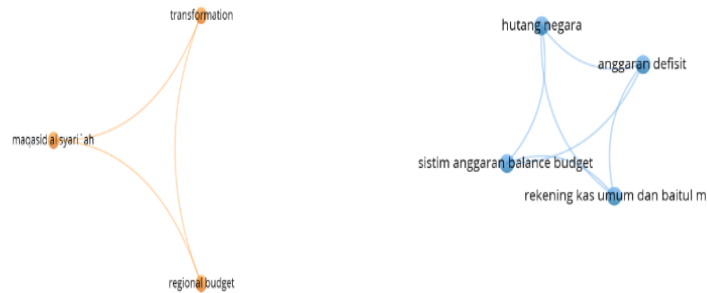
b. Fiqh Budget dengan Zakat dan Pajak

Gambar 6 Hubungan Fiqh Budget dengan Ekonomi Islam, Anggaran Berbasis Kinerja dan Zakat

Kajian mengenai fiqh budgeting oleh beberapa peneliti juga dihubungkan dengan konsep ekonomi Islam dan sistem anggaran berbasis kinerja sebagaimana riset Jaelani¹⁸ yang mengomparasikannya dengan antara sistem anggaran berimbang. Selain itu, penelitian mengenai fiqh budgeting juga disandingkan dengan kajian komparatif antara pajak dan zakat, seperti studi yang dilakukan oleh Aini¹⁹. Menurut PMK 94 Tahun 2013, sistem anggaran berbasis kinerja adalah suatu pendekatan dalam sistem perencanaan dan penganggaran belanja negara. Pendekatan ini secara jelas menunjukkan alokasi pendanaan serta kinerja alokasi yang diharapkan, dan menekankan pada efisiensi dalam proses pencapaian tujuan kinerja.

¹⁸ Jaelani, "Sistem Anggaran Berbasis Kinerja Pada APBN Di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam."

¹⁹ Aini, "Kebijakan Fiskal Dalam Ekonomi Islam."



a. Fiqh Budget dengan Transformasi Budget

b. Fiqh Budget dengan Balance Budget

Gambar 7 Hubungan Fiqh Budgeting dengan Transformasi Budgeting dan Defisit Anggaran

Selanjutnya ketika dihubungkan dengan transformasi sistem budgeting, keyword yang muncul adalah konsep budgeting berbasis maqashid syariah²⁰. Hal ini berarti bahwa jika dilihat dari perspektif fiqh. Partisipasi masyarakat dalam menentukan kebutuhan dasar rakyat dapat membantu memastikan bahwa rencana negara untuk pertumbuhan ekonomi efisien dan akurat.

Selain itu, penerapan prinsip-prinsip Maqashid al-syariah dalam proses pengelolaan anggaran negara memastikan bahwa hak-hak dasar warga negara dalam hal pendidikan, ekonomi, budaya, sistem hukum, dan politik dilindungi. Sedangkan ketika dihubungkan dengan keyword defisit anggaran, hutang negara maka konsep yang muncul adalah sistem anggaran berbasis balance

²⁰ Agus Arwani, "Konstruksi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Fiqh Anggaran Yang Bebas Akuntansi Syariah," *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 2, no. 2 (January 8, 2017), <https://doi.org/10.22515/al-ahkam.v2i2.279>; Delly Maulana, "Budget Policy Innovation Through Participatory Budgeting In The Provincial Government Of Banten," *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi* 15, no. 1 (June 29, 2018): 97-102, <https://doi.org/10.31113/jia.v15i1.139>.

budget²¹. Anggaran, juga dikenal sebagai rencana keuangan, dikatakan seimbang jika jumlah uang yang masuk sama dengan jumlah uang yang keluar. Sehingga tidak terjadi defisit maupun surplus anggaran. Meskipun gagasan anggaran berimbang dapat diterapkan pada setiap organisasi yang memiliki pendapatan operasional dan biaya operasional, penerapan gagasan ini paling sering terlihat dalam konteks anggaran untuk entitas pemerintah.

Jenis dan Metode Penelitian

Berdasarkan kajian systematic literature review ditemukan bahwa seluruh kajian mengenai fiqh budgeting di Indonesia mayoritas merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan dan lapangan. Sedangkan berkaitan dengan metode dan hasil penelitian, masing-masing memiliki kekhasan sendiri sesuai dengan objek dan datanya.

Tabel 4 Jenis dan Metode Penelitian

No	Peneliti dan Tahun	Judul	Metode
1	Jaelani 2012	Pengelolaan Anggaran dan Politik Anggaran di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode historis dan verstehen.
2	Muhajirin 2016	KONSEP HUTANG NEGARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM (Studi Analisis Antara Konsep Anggaran Balance Budget dengan Defisit Budget)	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan library research dan komparatif

²¹ Muhajirin, "Konsep Hutang Negara Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam," *Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 3, no. 6 (2016): 347-58, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30868/am.v3i06.149>; Siswadi Sululing, Haruni Ode, and Mohammad Gifari Sono, "Financial Management Model Village," *International Journal of Applied Business and International Management* 3, no. 2 (December 20, 2018): 105-16, <https://doi.org/10.32535/ijabim.v3i2.163>; Mohammad Ghazali and Ria Khoirunnisa, "Konsep Pengelolaan Keuangan Islam Menurut Pemikiran Abu Ubaid," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)* 4, no. 1 (November 2, 2018): 64, <https://doi.org/10.20473/jebis.v4i1.10068>.

No	Peneliti dan Tahun	Judul	Metode
3	Arwani 2017	Konstruksi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Fiqh Anggaran Yang Bebas Akuntansi Syariah	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan library research
4	Jaelani 2017	Manajemen Pengeluaran Publik di Indonesia: Tinjauan Ekonomi Islam Pada APBN 2017	Dalam penelitian ini, pengelolaan belanja publik di Indonesia pada APBN 2017 akan dianalisis dalam tinjauan pustaka yang komprehensif. Data dikumpulkan dari dokumen sumber Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan informasi berupa rancangan anggaran tanggapan atas penetapan tanggal 18 Agustus 2016, sampai dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2017 pada tanggal 17 November 2016. Data tersebut ditelaah dengan menggunakan analisis data kebijakan pengelolaan belanja publik di Indonesia, teori belanja publik dan barang publik, kemudian ditelaah dengan analisis komparatif belanja

No	Peneliti dan Tahun	Judul	Metode
5	Ghozali 2018	Konsep Pengelolaan Keuangan Islam Menurut Pemikiran Abu Ubaid	<p>publik dalam ekonomi syariah, sehingga diperoleh kesimpulan dari pembelajaran.</p> <p>Penelitian ini menggunakan jenis penelitian literatur (library research) dengan pendekatan teoritis. Penelitian ini menggunakan metode studi analisa kritik dan kajian penelitian. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Metode analisis data, dengan menggunakan teknik induktif deskriptif.</p>
6	Jaelani 2018	Sistem Anggaran Berbasis Kinerja pada APBN di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam	<p>Dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan content analysis dalam memahami teori dan dokumen sistem keuangan di Indonesia. Langkah-langkah yang dilakukan adalah pengumpulan data berupa dokumen tentang keuangan berbasis kinerja, melakukan verifikasi dokumen yang sesuai dengan masalah yang ada, menganalisis dokumen dengan teori yang tepat, dan</p>

No	Peneliti dan Tahun	Judul	Metode
			membuat kesimpulan.
7	Ahmad 2019	Fiqh of Budgeting: Study of Management of the State Budget for People's Welfare in the Perspective of Maqâshid al-Shari'ah	Melalui penelitian kualitatif, kajian ini bertumpu pada sumber-sumber pustaka yang memuat tentang pengelolaan anggaran negara dalam narasi fikih anggaran dan Maqâshid al-shari'ah sebagai basis utama studi literatur ini.
8	Arif 2019	Anggaran Belanja Daerah Berbasis Maqasid al Syari'ah: Analisis Realisasi Anggaran Kota Palopo	Jenis penelitian adalah penelitian lapangan bersifat deskriptif dan eksploratif, menggunakan multi pendekatan seperti normatif, yuridis, sosiologis, dan teologi kesejahteraan.
9	Arno 2019	Penyusunan Anggaran Perspektif Fiqhi Anggaran Hukum Ekonomi Syariah	Studi kepustakaan mengenai konsep anggaran dalam fiqh.
10	Junaedi 2019	Reaktualisasi & Revitalisasi Sumber Penerimaan Negara	Metode yang digunakan adalah studi literatur dan analisis deskriptif kualitatif terhadap pemikiran-pemikiran yang berkembang dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam serta upaya adaptasi, aktualisasi, revitalisasi dan kontekstualisasinya untuk merumuskan sumber-sumber

No	Peneliti dan Tahun	Judul	Metode
11	Suganda 2019	The Value of Local Wisdom in the Contextualization of Budgeting in Aceh	penerimaan APBN Indonesia yang lebih stabil, berkah dan berkelanjutan. Dari segi substansi, penelitian ini tergolong penelitian kualitatif, yang menitikberatkan pada kedalaman dan ketajaman penelitian. Jadi, jika penelitian kuantitatif lebih pada kerangka yang luas dan luas, studi kualitatif menggali, menukik, dan mendalam. Penganggaran syariah merupakan nilai yang dalam konteks ini ingin dimasukkan dalam anggaran di Aceh Selatan.

Berdasarkan paparan pada tabel 4, mayoritas penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif kepustakaan²². Selain itu

²² Muhajirin, "Konsep Hutang Negara Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam"; Arwani, "Konstruksi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Fiqh Anggaran Yang Bebas Akuntansi Syariah"; Aan Jaelani, "Manajemen Pengeluaran Publik Di Indonesia: Tinjauan Ekonomi Islam Pada APBN 2017 Aan," vol. 11 (University Library of Munich, Germany, 2017), <https://mpa.ub.uni-muenchen.de/77423/>; Ghozali and Khoirunnisa, "Konsep Pengelolaan Keuangan Islam Menurut Pemikiran Abu Ubaid"; Jaelani, "Sistem Anggaran Berbasis Kinerja Pada APBN Di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam"; M Ahmad, "Fiqh of Budgeting: Study of Management of the State Budget for People's Welfare in the Perspective of Maqâshid Al-Shari'ah," *Al-'Adalah*, no. 9 (2019): 177-206, <http://103.88.229.8/index.php/adalah/article/view/4159>; Abd Kadir Arno, "Penyusunan Anggaran Perspektif Fiqhi Anggaran Hukum Ekonomi Syariah," *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law* 1, no. 1 (May 20, 2019): 30-40, <https://doi.org/10.24256/alw.v1i1.625>; Dedi Junaedi and Faisal Salistia, "Reaktualisasi & Revitalisasi Sumber Penerimaan Negara," *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal* 1, no. 2 (December 20, 2019): 133-52, <https://doi.org/10.47467/reslaj.v1i2.105>; Delfi Suganda and Teguh Murtazam, "The Value of

terdapat kajian fiqh budgeting yang menggunakan pendekatan sejarah²³. Terdapat 1 (satu) penelitian kualitatif lapangan dengan melakukan riset terhadap Realisasi Anggaran Kota Palopo²⁴.

Peneliti paling produktif yang mengaji mengenai fiqh budgeting ini adalah Jaelani, pada riset awal ia meneliti tentang Pengelolaan APBN dan Politik Anggaran di Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Islam²⁵. Menurutnya kebijakan pembangunan di era reformasi harus mengutamakan paradigma pembangunan manusia yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku pembangunan dan menempatkan ekonomi lokal sebagai wahana kesejahteraan masyarakat²⁶. Selanjutnya, ia mengevaluasi tentang pengelolaan belanja publik di Indonesia dalam APBN 2017²⁷. Hasil penelitian menyatakan bahwa pengelolaan belanja publik di Indonesia telah menerapkan sistem distribusi yang membagi belanja publik untuk belanja pemerintah pusat, transfer ke daerah, dan dana desa. Menurutnya, pengeluaran publik pada pemerintah Indonesia sebagai alat yang efektif untuk mengalihkan sumber daya ekonomi dan meningkatkan pendapatan masyarakat secara keseluruhan, dan difokuskan pada perwujudan kesejahteraan rakyat. Riset berikutnya dilakukan pada tahun 2018, artikel ini mengkaji anggaran negara dengan sistem keuangan berbasis kinerja di Indonesia, yang sebelumnya menerapkan sistem keuangan berimbang²⁸. Tulisan ini menyimpulkan bahwa sistem keuangan berbasis kinerja di Indonesia memberikan arah baru dalam pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel untuk kegiatan pembangunan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Local Wisdom in the Contextualization of Budgeting in Aceh," *Lambung Mangkurat Law Journal* 4, no. 1 (March 30, 2019): 74, <https://doi.org/10.32801/lamlaj.v4i1.85>.

²³ Jaelani, "Pengelolaan APBN Dan Politik Anggaran Di Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Islam."

²⁴ Arif, "Anggaran Belanja Daerah Berbasis Maqasid Al Syari'ah: Analisis Realisasi Anggaran Kota Palopo."

²⁵ Jaelani, "Pengelolaan APBN Dan Politik Anggaran Di Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Islam."

²⁶ Jaelani.

²⁷ Jaelani, "Manajemen Pengeluaran Publik Di Indonesia: Tinjauan Ekonomi Islam Pada APBN 2017 Aan."

²⁸ Jaelani, "Sistem Anggaran Berbasis Kinerja Pada APBN Di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam."

Selain itu terdapat dua riset yang menghubungkan konsep fiqh budgeting dengan konteks regulasi. Pertama, penelitian yang membahas tentang anggaran belanja daerah berbasis maqashid al syari'ah: analisis realisasi APBD kota palopo dengan fokus permasalahan yaitu, realitas pemberdayaan anggaran belanja pemerintah dan realisasi pemanfaatannya di Kota Palopo, dan kebijakan pemerintah dalam mendorong peningkatan taraf hidup masyarakat dengan realisasi anggaran belanja pemerintah secara hierarki atau interkoneksi konsep maqashid al-syari'ah²⁹. Kedua, riset yang membahas tentang penganggaran yang dikontekstualisasikan dengan nilai-nilai Aceh yaitu nilai lokal penerapan syariat Islam di Aceh. Riset ini mendapatkan kesimpulan bahwa fiqh budgeting merupakan nilai yang dalam konteks ini ingin dimasukkan dalam anggaran di Aceh Selatan. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa dalam hal penentuan pasca pengeluaran dimungkinkan untuk memasukkan nilai-nilai syariat Islam. Dalam hal ini pos pengeluaran didasarkan pada maqashid as-Syariah. Dari segi penerimaan, hanya zakat, shadaqah, dan infaq yang bisa dikontekstualisasikan. Adapun usyr, rikaz, dll tidak mungkin karena penerimaan daerah dari sisi fiskal diatur begitu kaku dalam peraturan negara.

Penutup

Berdasarkan hasil systematic literature review, terdapat 11 jurnal yang membahas mengenai fiqh budgeting di Indonesia yang dimulai pada tahun 2012 hingga 2019. Riset dalam jurnal ilmiah mengenai topik ini didominasi oleh pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka, hanya 1 (satu) jurnal yang menggunakan pendekatan lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa pada tataran empiris riset mengenai fiqh budgeting di Indonesia masih sangat minim. Riset mengenai fiqh budgeting pada artikel-artikel terpilih telah mengintegrasikan dengan konsep anggaran yang diterapkan di Indonesia, hanya saja belum ada penjelasan praktis tentang aplikasinya. Untuk mengkontekstualisasikannya, riset-riset mengenai fiqh budgeting mengusulkan dua model yakni kontekstualisasi fiqh bugeting berbasis Maqashid Syariah dan kontekstualisasi Fiqh

²⁹ Arif, "Anggaran Belanja Daerah Berbasis Maqasid Al Syari'ah: Analisis Realisasi Anggaran Kota Palopo."

Budgeting berbasis integrasi pajak dan zakat. Sebagai rekomendasi, riset-riset berikutnya perlu melakukan studi terapan (konsep fiqh budgeting) dalam proses penganggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Daerah maupun instansi tertentu.

Daftar Pustaka

- Ahmad, M. "Fiqh of Budgeting: Study of Management of the State Budget for People's Welfare in the Perspective of Maqâshid Al-Shari'ah." *Al-Adalah*, no. 9 (2019): 177-206. <http://103.88.229.8/index.php/adalah/article/view/4159>.
- Ahmad, Maghfur. "Fiqh of Budgeting: Study of Management of the State Budget for People's Welfare in the Perspective of Maqâshid Al-Shari'ah." *Al-Adalah* 6, no. 1 (2019). <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/adalah.v16i1.4159>.
- Aini, Ildi. "Kebijakan Fiskal Dalam Ekonomi Islam." *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 17, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.32694/010760>.
- Arif, Firman Muhammad. "Anggaran Belanja Daerah Berbasis Maqasid Al Syari'ah: Analisis Realisasi Anggaran Kota Palopo." *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 13, no. 1 (July 20, 2019): 51-74. <https://doi.org/10.18326/infs13.v13i1.51-74>.
- Arno, Abd Kadir. "Penyusunan Anggaran Perspektif Fiqhi Anggaran Hukum Ekonomi Syariah." *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law* 1, no. 1 (May 20, 2019): 30-40. <https://doi.org/10.24256/alw.v1i1.625>.
- Arwani, Agus. "Konstruksi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Fiqh Anggaran Yang Bebas Akuntansi Syariah." *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 2, no. 2 (January 8, 2017). <https://doi.org/10.22515/al-ahkam.v2i2.279>.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam Indonesia. Jilid. I. Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1997.*
- Faris., Nabih Amin. *History of the Arabs. The Muslim World. Vol. 27, 1937.* <https://doi.org/10.1111/j.1478-1913.1937.tb00371.x>.
- Ghozali, Mohammad, and Ria Khoirunnisa. "Konsep Pengelolaan Keuangan Islam Menurut Pemikiran Abu Ubaid." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)* 4, no. 1 (November 2, 2018): 64. <https://doi.org/10.20473/jebis.v4i1.10068>.

- Jaelani, Aan. "Manajemen Pengeluaran Publik Di Indonesia: Tinjauan Ekonomi Islam Pada APBN 2017 Aan." Vol. 11. University Library of Munich, Germany, 2017. <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/77423/>.
- — —. "Pengelolaan APBN Dan Politik Anggaran Di Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *ALQALAM* 29, no. 1 (April 30, 2012): 1. <https://doi.org/10.32678/alqalam.v29i1.589>.
- — —. "Public Expenditure Management in Indonesia: Islamic Economic Review on State Budget 2017." *Discussion Papers*. MDPI AG, 2017. <https://doi.org/10.20944/preprints201706.0122.v1>.
- — —. "Sistem Anggaran Berbasis Kinerja Pada APBN Di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam." *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 10, no. 1 (June 16, 2018): 128. <https://doi.org/10.24235/amwal.v10i1.2871>.
- Junaedi, Dedi, and Faisal Salistia. "Reaktualisasi & Revitalisasi Sumber Penerimaan Negara." *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal* 1, no. 2 (December 20, 2019): 133–52. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v1i2.105>.
- Kitchenham, Barbara A., Emilia Mendes, and Guilherme H. Travassos. "Cross versus Within-Company Cost Estimation Studies: A Systematic Review." *IEEE Transactions on Software Engineering* 33, no. 5 (May 2007): 316–29. <https://doi.org/10.1109/TSE.2007.1001>.
- Latifah, Luluk, and Iskandar Ritonga. "Systematic Literature Review (SLR): Kompetensi Sumber Daya Insani Bagi Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia." *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*. Universitas Muhammadiyah Tangerang, 2020. <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2763>.
- Liberati, Alessandro, Douglas G. Altman, Jennifer Tetzlaff, Cynthia Mulrow, Peter C. Gøtzsche, John P.A. Ioannidis, Mike Clarke, P. J. Devereaux, Jos Kleijnen, and David Moher. "The PRISMA Statement for Reporting Systematic Reviews and Meta-Analyses of Studies That Evaluate Healthcare Interventions: Explanation and Elaboration." *BMJ (Clinical Research Ed.)* 339, no. jul21 1 (December 4, 2009): b2700–b2700. <https://doi.org/10.1136/bmj.b2700>.
- Maulana, Delly. "Budget Policy Innovation Through Participatory

- Budgeting In The Provincial Government Of Banten." *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi* 15, no. 1 (June 29, 2018): 97-102. <https://doi.org/10.31113/jia.v15i1.139>.
- Mawardi, Abi al Hasan Ali Ibn Muhammad Ibn Habib al Basari al Baghdadi al. *Kitab Al Ahkam Al Sulthoniyah Wa Al Wilayah Al Diniyah*. Beirut: Dar al Fikr, s.a, n.d.
- Muhajirin. "Konsep Hutang Negara Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam." *Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 3, no. 6 (2016): 347-58. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30868/am.v3i06.149>.
- Nomran, Naji Mansour, and Razali Haron. "A Systematic Literature Review on Shari'ah Governance Mechanism and Firm Performance in Islamic Banking." *Islamic Economic Studies* 27, no. 2 (January 1, 2020): 91-123. <https://doi.org/10.1108/ies-06-2019-0013>.
- Nurul Iman, Mustofa. "Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Berbasis Hukum Ekonomi Syari'ah: Kritik Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Di Indonesia." UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2015. <http://digilib.uinsgd.ac.id/17311/>.
- Rahmawati, Lilik. "Sistem Kebijakan Fiskal Modern Dan Islam." *OECONOMICUS Journal of Economics* 1, no. 1 (2016).
- Sambunjak, Dario, Miranda Cumpston, and Chris Watts. "Module 1: Introduction to Conducting Systematic Reviews. In: Cochrane Interactive Learning: Conducting an Intervention Review." Cochrane, 2017. <https://training.cochrane.org/interactivelarning/module-1-introduction-conducting-systematic-reviews>.
- Suganda, Delfi, and Teguh Murtazam. "The Value of Local Wisdom in the Contextualization of Budgeting in Aceh." *Lambung Mangkurat Law Journal* 4, no. 1 (March 30, 2019): 74. <https://doi.org/10.32801/lamlaj.v4i1.85>.
- Sululing, Siswadi, Haruni Ode, and Mohammad Gifari Sono. "Financial Management Model Village." *International Journal of Applied Business and International Management* 3, no. 2 (December 20, 2018): 105-16. <https://doi.org/10.32535/ijabim.v3i2.163>.